

Strategi Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan

Nailul Fauziyah^{1*}, Abdul Baid², Aditia Muhammad Noor³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

³Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

*corresponding author: nailulfauziyah@uin-malang.ac.id

ABSTRACT:

This study aims to analyze the deradicalism and terrorism efforts of the Indonesian government as a form of guidance and protection for former terrorists so that they can be rehabilitated both their actions and paradigms, so that there are no more attempts to discriminate and intimidate terrorist perpetrators and families in the community. This research offers a different offer in fostering a more inclusive paradigm to terrorist actors. This study used qualitative descriptive method. The strategy carried out by the Lingkar Perdamaian Foundation is through ideological development, assistance to prisoner families and economic recovery, so this step has implications for recognition of the Republic of Indonesia and religious tolerance.

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya deradikalisme dan terorisme pemerintah Indonesia sebagai bentuk pembinaan dan perlindungan bagi mantan teroris agar dapat direhabilitasi baik tindakan maupun paradigma yang dianutnya, sehingga tidak ada lagi upaya diskriminasi dan intimidasi bagi pelaku dan keluarga teroris ditengah masyarakat. Penelitian ini memberikan tawaran yang berbeda dalam pembinaan paradigma yang lebih inklusif kepada para pelaku teroris. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Strategi yang dilakukan Yayasan Lingkar Perdamaian melalui pembinaan ideologi, pendampingan keluarga napiter dan pemulihan ekonomi, sehingga langkah ini berimplikasi pada pengakuan terhadap NKRI dan sikap toleransi beragama.

Kata Kunci: Deradikalisasi; radikalisme; terorisme.

ARTICLE HISTORY:

Received: 2022

Accepted: 2022

Published: 1 Desember 2022

KEYWORDS:

Deradicalization;
radicalism; terrorism.

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan ideologi ekstremis yang berlabel agama. Para pengikut ideologi ini mengklaim diri sebagai penyeru "jihad". Teror yang mereka lakukan pun dianggap sebagai jihad melawan kezaliman. Meski aksi terorisme sepanjang tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan (Codingest 2022, t.t.), namun yang perlu diwaspadai aksi tersebut masih tetap bersifat *hit and run*. Di sisi lain, agama adalah pengatur norma, tatanan kehidupan untuk bisa hidup berdampingan. Agama tidak lain adalah ajaran cinta kasih yang dapat memberikan kedamaian bagi setiap pemeluknya (Noor, t.t.).

Ancaman terorisme kian merambah ke berbagai sektor salah satunya pendidikan (Mubarak dkk., 2020). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya preventif dengan langkah deradikalsiasi dan penanggulangan teroris. Upaya ini dilakukan untuk menghentikan bibit-bibit ekstremisme agama yang berujung tindakan terorisme. Karena gerakan-gerakan radikal tersebut terbukti menjadi salah satu yang memperburuk citra Islam di dunia (Hanani & Nelmaya, 2020).

Upaya deradikalisasi tidak sebatas pembinaan pemahaman keagamaan ekstremis menuju pemahaman inklusif, melainkan lebih pada perlindungan hak untuk dapat direhabilitasi dan hak hidup. Deradikalisasi juga memberikan perubahan sikap yang dianggap efektif bagi pelaku teroris. Semua ini akan mengantarkan masyarakat ke arah plural (Zainuddin, 2019) dan lebih berwawasan multikultural. Hal ini menunjukkan program deradikalisasi menjadi penting untuk memahamkan mutikulturalisme dan inklusivitas kepada masyarakat khususnya pelaku terorisme.

Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) adalah lembaga yang konsisten melaksanakan program deradikalisasi dan penanggulangan teroris. Lembaga ini memiliki strategi pelaksanaan deradikalisasi dan penanggulangan teroris yang berbeda dengan lembaga lain, yakni mengedepankan pembinaan ideologi, pendampingan keluarga dan peningkatan ekonomi. Deradikalisasi pada lembaga *maenstreem* kurang memberikan implikasi yang signifikan, sehingga hanya sekedar pembinaan ideologi. Padahal deradikalisasi juga harus dilihat melalui latar belakang bergabungnya kelopok teroris tersebut. Misalnya dalam catatan Poltak Partogi mengatakan bahwa salah satu alasan kelompok teroris ini muncul akibat kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi (Nainggolan, 2018), sehingga menjadi konsekwensi logis ketika penanganan terorisme bukan



saja sekedar pembinaan ideologi tetapi juga pendampingan psikis keluarga dan peningkatan ekonomi (Schwing, 2002).

Menurut Sukawarsini Djelantik, dalam catatannya menyatakan tidak setuju dengan klaim bahwa terorisme disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Menurutnya, perubahan tersebut tidak mutlak dan tidak selalu berujung pada aksi terorisme. Kemiskinan dan masalah ekonomi adalah hal yang berbeda dan dapat diselesaikan dengan mekanisme tersendiri dan tanpa kekerasan, yaitu *social escape* (Djelantik, 2010). Namun, Olaniyi Evans juga menyangkal bahwa lemahnya ekonomi dan ketimpangan sosial mencerminkan ketidakadilan sistem pemerintahan. Itulah sebabnya pengucilan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, keputusasaan dan frustrasi menyebabkan ekstremisme dan terorisme (Evans & Kelikume, 2019). Senada Hamisu Salihu menyatakan bahwa faktor ekonomi kemiskinan, pengangguran, buta huruf dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tidak dapat dikecualikan sebagai kemungkinan penyebab terorisme (Salihu, 2018). Akan tetapi tidak menutup kemungkinan persoalan ekonomi yang menjadi salah satu faktor yang juga dihadapi para teroris sehingga memungkinkan mereka kembali menjalani aktivitasnya sebagai seorang teroris (Yuryevich Zelenkov dkk., 2021) karena keputusasaan dan tidak terpenuhinya kebutuhan yang mendasar.

Oleh karena itu, deradikalisasi diharapkan menjadi strategi dan model yang menarik, yang tidak hanya menyangkut persoalan ideologis, tetapi juga mempertimbangkan semua aspek latar belakang teroris sebelumnya. Hal ini bukan hanya karena persoalan kemanusiaan, melainkan akan menimbulkan gejolak dari para pengikutnya untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi (Bakashmar, 2005). Upaya penanggulangan pelaku teroris juga dapat diselesaikan dengan cara-cara humanis, sehingga selain merehabilitasi untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, kita akan mengetahui bagaimana pergerakan dan doktrinasi kelompok teroris tersebut digencarkan, agar di kemudian hari menjadi langkah preventif yang lebih baik (Ramli, 2018).

Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) bekerja sama dengan pemerintah, didirikan sebagai wadah bagi mantan teroris agar memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran, serta setiap pelaku mantan terorisme tidak mengalami tindakan diskriminasi di tengah masyarakat. Lembaga yang menaungi pemahaman keagamaan ini berhasil menjadi representasi program

deradikalisasi dengan pemahaman agama yang lebih humanis, bukan dengan cara menghukum mati mantan pelaku teroris.

Yayasan Lingkar Perdamaian ini berhasil menciptakan label positif bahwa mantan teroris harus diperlakukan secara manusiawi, dengan bantuan pemahaman agama, pendidikan, dan wawasan kebangsaan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan sikap negatif terhadap mantan teroris di masyarakat (Indrawan & Aji, 2019). Keberadaan mantan terorisme perlu perhatian khusus melalui rehabilitas moral dan pemahaman keagamaan yang inklusif. Selain itu, alasan lain mengapa peneliti memilih Yayasan Lingkar Perdamaian karena yayasan ini didirikan oleh seorang mantan teroris, sehingga deradikalisasi menjadi lebih terukur yang disesuaikan dengan pengalaman.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bermaksud untuk memaparkan data secara deskriptif dengan mengkaji dan memahami fenomena sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan strategi deradikalisasi sindikat terorisme melalui kesadaran inklusif di Yayasan Lingkar Perdamaian.

Analisis penelitian ini menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman yang memiliki beberapa unsur yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2005). Reduksi ini digunakan untuk memusatkan informasi dari temuan lapangan, kemudian menyajikan representasi data dalam bentuk yang terstruktur sehingga mudah dipahami sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Lingkar Perdamaian

Lingkar Perdamaian merupakan salah satu lembaga yang bergandengan tangan dengan pemerintah yang bertujuan untuk deradikalisasi dan penanggulangan teroris. Yayasan ini menaungi mantan teroris yang pernah tergabung dalam kelompok teroris nasional hingga internasional. Berdirinya Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) dipelopori oleh Ali Fauzi yang merupakan



adik kandung Ali Ghufron, Amrozi dan Ali Imron. Secara historis Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) berawal dari pasca-bebasnya mantan tindakan terorisme pada tragedi Bom Bali I, yang terdiri dari: Ali Fauzi, Anis Yusuf alias Haris dan mantan narapidana lainnya yang juga pernah menjadi bagian dari lingkaran terorisme. Dibalik keberadaan mereka tidak lepas dari pengaruh teroris ulung yang lebih berpengaruh lainnya seperti Osama bin Laden dan Iqbal Hussein Thoyib merupakan pimpinan teroris dunia yang menjadi sosok dibalik perencanaan pengeboman Mabes Polri dan pensuplay senjata untuk membrangus polisi; serta Sumarno yang merupakan keponakan sekaligus tetangga Ali Fauzi yang pernah menimbun ribuan senjata yang dipersiapkan untuk tindakan teror di beberapa tempat yang direncanakan.

YLP berdiri pada tanggal 29 November 2016 dan berlokasi di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Jarak tempat dari pusat kota sekitar 2 km, anda juga bisa mencapai selatan melalui kecamatan Sukodadi sekitar 16 km dan 1 jam perjalanan melintasi Drajat.

Lingkar Perdamaian adalah yayasan yang didirikan oleh para mantan kombat dan mantan napi teroris di Lamongan Jawa Timur pada tanggal 29 November 2016. Dipelopori Ali Fauzi Manzi adik kandung trio bom Bali satu Ali Ghufron, Amrozi dan Ali Imron. Tahun 1994 Ali Fauzi Manzi dikirim Hambali ke *camp* Abu Bakar dan *camp* Hudaibiyyah untuk masuk akademi militer Moro Islamic Liberation Front (MILF) Mindanao Philipina Selatan. Jabatan terakhir di kelompok Jamaah Islamiyah sebagai kepala instruktur perakitan bom provinsi Jawa Timur. Para pendiri Lingkar Perdamaian mempunyai latar belakang yang berbeda ada yang dilatih di *camp* militer Afghanistan, *camp* militer Mindanao, Ambon dan Poso. Setelah keluar dari penjara dan tempat konflik, mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian kawan-kawan sudah kebablasan dan harus dihentikan (Dokumen Profil YLP, n.d., t.t.).

Seperti namanya, YLP berharap dapat menciptakan perdamaian struktural dan berkesinambungan dengan menghubungkan mereka yang terlibat dalam serangan teroris di Indonesia. Ditetapkan agar orang-orang yang berstatus mantan teroris menjadi agen perubahan dan perdamaian di masyarakat, agar tidak terjerumus ke dalam perangkap terorisme melalui tindakan yang mendorong perubahan positif di masa depan.

Lingkar perdamaian didirikan untuk mantan terorisme agar mereka menjadi duta perdamaian lintas sektor di lintas sektor (Wawancara Ali Fauzi, Ketua YLP, t.t.), khususnya berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Kegiatan yang dilakukan YLP adalah deradikalisasi dan penanggulangan teroris yang menjadi agenda penting dalam memberikan pemahaman ancaman kelompok terorisme. Selain itu, YLP juga memberikan edukasi dengan diselingi kisah masa kelam mereka yang terjaring anggota teroris, aksi pengeboman, penembakan dan perampukan dengan dalih harta *fai'*.

Selain itu, situasi tersebut menciptakan stigma negatif bagi keluarga mantan teroris dan didiskriminasi di masyarakat (Firmansyah, 2019). Jika hal ini dilakukan tanpa pendampingan maka dikhawatirkan keluarga korban menjadi bibit dan poros baru untuk mengikuti jejak kepala keluarganya (Sukabdi, 2017). Atas keprihatinan tersebut, Ali Fauzi yang juga mantan teroris memprakarsai berdirinya lembaga deradikalisasi di Lamongan, yaitu Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP). Sesuai dengan namanya, lembaga ini diharapkan dapat menjadi mediator perdamaian.

Tepat ketika YLP resmi didirikan, rumah Ali banyak dikunjungi banyak pihak dan mantan aktifis teroris untuk sekedar berbincang dan bertukar pikiran. Setidaknya satu bulan sekali, mantan para teroris mengunjungi sekretariat dan meramaikan kegiatan-kegiatan di sana. Bahkan tidak jarang mereka bertukar pendapat hingga mengutarakan kesulitan pasca-bebas penjara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan keluarganya. Kehadiran YLP diharapkan menjadi perekat dari kesenjangan pandangan negatif masyarakat terhadap mantan napiter. Karena tentu keinginan mantan napiter untuk hidup berdampingan dengan masyarakat adalah sesuatu yang didambakan, hidup normal dan menjadi bagian dari masyarakat, ingin bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak, baik untuk dirinya maupun keluarganya. YLP berharap masyarakat dapat memaafkan dan menerima menjadinya bagian dari warga sekitar.

Diskriminasi pada eks-teroris bukan hal yang dibenarkan, justru sikap tersebut mengundang kebencian pada anak keluarga korban. Akhirnya, timbul bibit-bibit baru teroris yang siap melawan akibat perlakuan masyarakat yang tidak menerima keberadaan eks-teroris. Untuk itu, jika eks-teroris sudah mengikrarkan diri bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali



maka sudah seudah selayaknya masyarakat menerima keberadaan mereka dan turut mengarahkan ke jalan yang lebih baik. (Wawancara Sumarno, Bendahara YLP, t.t.). Pengakuan dari beberapa pihak (mantan teroris) juga menunjukkan rasa kesulitan menjalani kehidupan normal ketika berada di tengah masyarakat yang bersikap sentimen pada mereka. Keadaan itu berdampak pada sulitnya mendapatkan pekerjaan dan pemulihan ekonomi yang tidak stabil pasca bebas dari penjara.

Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) merupakan tempat untuk saling berbagi kesulitan dan keluh kesah. Mulai dari sulitnya mendapatkan akses pekerjaan hingga sulitnya menghidupi anak-anak yatim yang ditinggal ayahnya (akibat tindakan teror) dan kami merasa dikucilkan di lingkungan tempat tinggal (Wawancara Sumarno, t.t.). YLP bukan hanya sebatas organisasi melainkan wadah yang dapat membantu keluar dari lingkaran terorisme.

Penuturan (informan) jika pasca-bebasnya dari lapas tidak menemukan lembaga seperti YLP, sudah dipastikan mereka kebingungan dan sulit sekali mencari kepercayaan (Wawancara Sumarno, t.t.). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan YLP menjadi angin segar yang terasa sangat dibutuhkan bagi eksteroris dan keluarganya. Di saat mereka tidak diharapkan di tengah masyarakat dan mendapatkan diskriminasi, YLP hadir membantu mencari jalan keluar dari masalah tersebut.

Kolaborasi Stakeholder dalam Pembangunan YLP

Perjalanan berdirinya YLP tentu tidak bisa lepas dari peran berbagai pihak, baik dari masyarakat, pemerintah hingga aparat kepolisian yang terlibat dalam program deradikalisasi dan penanggulangan teroris bagi mantan napiter. Dukungan ini dimaksudkan agar mantan napiter tidak kembali lagi ke jurang kegelapan berlabel teroris yang tentu merugikan dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Semua pihak yang terlibat dan turut mendukung berdirinya YLP sangat dirasakan langsung, baik dukungan moral hingga materi untuk kelangsungan operasional YLP. Sekali lagi bahwa upaya ini secara konseptual merujuk pada pemulihan inisiatif strategis dan instrumental, yakni rehabilitasi keagamaan (deradikalisasi dan penanggulangan teroris), pemulihan sosio-psikis dan reintegrasi sosial.

Pemulihan ini pada prinsipnya adalah usaha yang tergabung dari para ahli, spesialis dan masyarakat untuk membuat platform bersama dalam rangka mengembalikan pemahaman ekstremis mantan terorisme menuju pemahaman agama yang inklusif. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian YLP diantaranya:

1. BNPT

Peran BNPT dalam proses berdirinya YLP terbilang cukup besar, kontribusi moral dan materi menjadi tugas dalam menyelesaikan tindak kasus terorisme di Indonesia, khususnya di YLP. Sejak awal BNPT sudah memperkirakan bahwa beridirnya YLP harus menjadi perhatian utama yang perlu didukung secara optimal agar program deradikalisasi pasca-pidana dapat berjalan dengan baik. Untuk itu dukungan penuh dari BNPT sangat terasa selama proses berdirinya YLP hingga kini.

Segala upaya yang dilakukan BNPT terhadap YLP bukan sekedar wacana. Kesiapan dalam pembangunan gedung hingga tempat ibadah adalah bukti bahwa pemerintah dengan serius menginginkan program deradikalisasi dan penanggulangan teroris berjalan dengan baik melalui YLP. Sinergitas ini menjadikan YLP mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah. Bukti bantuan dari BNPT pada tahun 2017 adalah pemberian dana untuk pembangunan masjid dan pendirian gedung TPQ yang terletak tidak terlalu jauh dengan lokasi.

Walaupun demikian, kontribusi BNPT juga tidak bisa dihiraukan, BNPT memang tidak secara langsung memberikan dana operasional dan taktis untuk pembangunan lembaga rehabilitasi YLP yang bersifat inisiatif. Tetapi BNPT juga memobilisasi melalui relasinya untuk membantu mendapatkan bantuan pembangunan dan operasional YLP. Strategi seperti ini nampaknya juga berlaku di beberapa lembaga non pemerintah yang sulit mendapatkan akses bantuan (Wawancara Ali Fauzi, t.t.).

Sinergi dan dukungan seperti ini juga bukan hanya dilakukan oleh BNPT, tetapi juga pemerintah daerah bahkan pusat turut berpangku tangan dalam membantu dalam pendirian YLP. Seperti Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan bantuan mobil untuk operasional yayasan. Selain



itu, Kemensos juga turut membantu menyumbang hewan ternak berupa Kambing untuk nantinya dijadikan usaha ternak bagi mantan napiter.

2. Polisi

Polisi juga memberikan *backup* terhadap pendirian YLP dengan memberikan bantuan berupa uang hingga bantuan akses pekerjaan. Polisi juga menyediakan sarana prasarana seperti meja, kursi, terop dan lain-lain diberikan secara sukarela demi menunjang kegiatan deradikalasi dan penanggulangan teroris di YLP. Sinergi YLP dengan polisi bukan hanya dalam persoalan bantuan sarana prasarana, polisi juga memberikan pengamanan yang optimal pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Polisi juga menerbitkan surat keterangan dari kepolisian untuk membantu para napiter dalam mencari pekerjaan yang menambah peluang untuk membuka *kran* bagi anggota YLP dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini bertujuan agar perusahaan yang menerimanya tidak lagi merasa takut akan kehadiran anggota YLP untuk menjadi karyawan. Surat keterangan ini berisi bahwa mereka tidak lagi terlibat dalam kegiatan terorisme dan mendukung Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Strategi Pembinaan Deraikalisasi di YLP

Upaya YLP dalam program deradikalasi tentu tidak akan mudah. Tentu saja pendekatan agamanya berbeda, banyak yang masih relatif ketat. Hal itu dimungkinkan ketika masa rehabilitasi di lapas belum optimal, ketika benih-benih radikalisme masih ada dalam pikiran dan tindakan mereka. YLP menghadirkan pendekatan yang dinamis dan humanistik untuk merespon para mantan napi yang belum sepenuhnya meninggalkan ideologi aslinya. Tidak menghendaki perubahan ideologi dengan cara paksaan karena akan berdampak pada gagalnya rencana pemulihan ideologi.

a. Penguatan Paradigma Inklusif

Sesuai dengan tujuan awal dibentuknya YLP adalah untuk menggiring para napiter dan *kombatan* ke tempat yang lebih baik. Dikarenakan pasca-pembebasan pidana kebanyakan mantan napiter mendapatkan stigma yang kurang baik di tengah masyarakat. Mereka beranggapan bahwa mantan napi masih belum sepenuhnya menjadi orang

baik dan masih terkesan sebagai orang jahat. Semua napiter mengalami kesulitan untuk membaur dan beradaptasi dengan masyarakat, sikap masyarakat yang skeptis inilah yang membuat mantan napiter dan kombatan sulit untuk hidup di lingkungannya. Untuk itulah YLP ini didirikan sebagai jembatan untuk memberikan proses asimilasi yang optimal (Wawancara Ali Fauzi, t.t.).

Sebelum mantan napiter berbaur dengan masyarakat umum, YLP memberikan pengarahan dan wawasan mengenai pendekatan emosional dan perubahan *mainset* dari eksklusifisme menuju inklusifisme (Wawancara Ali Fauzi, t.t.), agar mereka tidak lagi bersikap seolah-olah paling benar dalam urusan agama. Setidaknya ada beberapa langkah untuk mendorong paradigma partisipatif bagi mantan narapidana; identifikasi narapidana, pelatihan dan evaluasi terhadap radikal化. Walaupun berbeda dengan lapas yang menggunakan strategi deradikalasi berupa identifikasi, rehabilitasi, reeduksi, resosialisasi dan monitoring (Firdaus, 2017). Fase di lapas memang lebih panjang, namun pada dasarnya kedua lembaga baik lapas maupun YLP memiliki harapan yang sama agar mantan napi menjadi pribadi yang lebih baik.

1. Identifikasi Napiter

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan anggota yang baru masuk YLP dengan kelompok teroris sebelumnya, sehingga untuk memberikan pemahaman yang inklusif disesuaikan dengan tingkat kekuatan ideologi sebelumnya. Meski demikian, YLP tetap menggunakan standar penanganan yang biasanya digunakan, yakni doktrin agama yang moderat dan cinta nasionalisme. Jika hal tersebut terus-menerus dilakukan maka perubahan paradigma radikal lambat laun akan berubah dengan sendirinya. Pendekatan ini menjadi satu keniscayaan sebab dalam proses deradikalasi tidak mungkin seseorang langsung diberikan doktrin karena tidak semua mantan napiter tergolong sebagai ideolog, sebagian besar juga lahir sebagai simpatisan karena pemahaman agama yang minim.



2. Pembinaan Kontra Radikalisasi

Perubahan ideologi tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan mengalami proses yang terbilang cukup panjang. Hal ini juga dialami oleh hampir semua mantan teroris yang harus bergelut dengan pikiran dan diri mereka sendiri untuk menemukan kebenaran dalam beragama. Perubahan menuju pemikiran moderat juga terjadi demikian, mereka mengalami pergulatan yang hebat dalam pikiran tentang bagaimana seharusnya ajaran agama yang semestinya, kemudian dipengaruhi juga oleh sejumlah faktor yang pada akhirnya membantuk kesadaran moderat.

Proses perubahan keagamaan mantan napiter relatif bervariasi, tidak sedikit dari mereka masih menganut ideologi ekstremis meski sebagian lagi mampu menerima perubahan untuk mengikuti materi-materi kebangsaan dan keagamaan. Menyikapi perubahan idelogi mantan napiter yang belum sepenuhnya terbangun, YLP melakukan interaksi emosional yang lebih humanis dan dinamis serta tidak langsung memaksakan mereka dan lebih menyarankan untuk fokus pada kehidupan mereka sehari-hari. Perubahan ideologi tentunya dilakukan secara bertahap dan tidak menegaskan upaya perubahan yang digunakan YLP dalam menangani ideologi radikal mantan napiter.

Kontra radikalis dilakukan untuk menemukan titik perbedaan dialektis dalam diskursus radikalisme yang mengancam hak manusia. Untuk itulah hal ini dilakukan agar terjadi benturan intelektual dari pemikiran ekstremisme sebelumnya, sehingga anggota mampu menalar lebih jernih lagi tentang bagaimana seharusnya ajaran agama dilakukan dengan "ramah" bukan "amarah". Melalui diskusi rutin yang dilaksanakan YLP untuk umum setiap anggota bebas mengekspresikan pendapatnya selama di forum, namun pada akhirnya YLP juga akan menggiring tentang bahaya laten radikalisme yang berujung pada terorisme. Gesekan intelektual dalam forum diskusi ini setidaknya menjadi protektor dalam menangkal gerakan ekstremisme di Indonesia.

Perubahan ideologi ini merupakan hasil dari benturan intelektual dan interaksi sosial yang mendorong mereka bersikap toleransi agar dapat menjadi bagian dari masyarakat. Deradikalisasi dan penanggulangan teroris pada dasarnya membentuk pribadi humanis sebagai unsur turunannya hingga membentuk kesadaran baru dari ekstremisme menuju inklusifisme.

3. Monitoring dan Evaluasi

Tahapam terakhir dalam bimbingan paradigma inklusif adalah monitoring dan evaluasi, yakni proses untuk menganalisis sejauh mana perubahan mantan napiter. Monitoring dan evalusi ini juga dilakukan untuk membandingkan dampak dari program bimbingan pemahaman inklusif berjalan dengan baik, efektif atau justru kurang maksimal. Konsistensi YLP dalam mengevaluasi mantan napiter ini tidak dilakukan secara *ad-hoc* atau berorientasi pada projek (*project oriented*) tetapi juga dilakukan dengan tepat guna, agar program ini menjadi kebijakan yang berkelanjutan baik secara kelembagaan maupun kerjasama antar pemangku kebijakan.

b. Pembinaan Keluarga Narapidana Teroris

Yayasan Lingkar Perdamaian didirikan tidak hanya untuk menangani isu-isu ideologis eks-terorisme, tetapi juga merekrut anak-anak teroris untuk dirawat dan berpartisipasi dalam program radikalasi. Pembinaan tersebut dimulai dari mendidik, mengurus hingga memenuhi kebutuhan sehari-harinya. YLP merasa bertanggung jawab jika anak-anak dan keluarnya yang ditinggal meninggal atau ditahan harus hidup kesusahan. Untuk itulah YLP membantu menyelesaikan masalah ini sebagai wujud kepedulian terhadap mereka. Di lain sisi, perlindungan ini dilaksanakan agar mereka merasa aman dalam hidup bermasyarakat dan tidak mengalami diskriminasi (Hidayat & Husna, t.t.). Karena sejauh ini, sebelum YLP itu berdiri, keluarga pelaku teror selalu mendapat perlakuan intimidasi dan diskriminasi dalam masyarakat. Bahkan masyarakat menganggap mereka sebagai sebuah ancaman karena dinilai berpotensi melakukan teror. Perilaku ini tidak hanya berakibat pada psikis anak dan keluarganya, tetapi juga menjadi langkah strategis (Sukabdi, 2017).



Setidaknya, ada beberapa alasan mengapa YLP memberikan pembinaan yudisial bagi anak-anak, yang tentunya berbeda dengan di bawah naungan pemerintah. *Pertama*, stigma negatif yang melekat bagi anak-anak dalam masyarakat. *Kedua*, besarnya keterserapan ideologi radikal yang diajarkan oleh orang tuanya, sehingga memungkinkan tumbuhnya bibit baru terorisme. *Ketiga*, peluang mereka untuk ditrekrut kelompok teroris tersebut sangat besar (Altier dkk., 2021). Karena pola asuh dalam keluarga juga merupakan faktor penting dalam penanaman dan penanaman nilai-nilai ideologi (Fauziyah & Hidayati, 2022).

Oleh karena itu, YLP berusaha memutus mata rantai ini dengan mengajarkan anak-anak pemahaman agama yang benar sambil memastikan kehidupan yang bermartabat. Kegiatan ini juga diduga dilakukan oleh kelompok berisiko, anak yang lahir akibat konflik daerah, teroris atau anak yang mengalami kekerasan (Dhumad dkk., 2020). Usia mereka tergolong sebagai masa pembentukan identitas, sehingga sikap yang labil mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hingga saat ini, jumlah anak yang diasuh YLP sebanyak 20 orang (Dokumen Profil YLP n.d. t.t.), jumlah ini bisa saja terus bertambah dan YLP tidak keberatan untuk melakukan pembinaan bagi mereka.

c. Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi menjadi perhatian khusus (Sugiarto, 2020). Hal ini dilaksanakan untuk membantu meringankan beban mantan napiter agar mereka bisa bertahan hidup di tengah kesulitan mereka yang berstatus sebagai mantan teroris. Dititik inilah Ali bersama rekannya mendirikan YLP, karena dia bersama teman-temannya mengalami masalah keuangan dan sulit mendapatkan pekerjaan karena gelar teroris sebelumnya masih menancap. Berkat kerja keras Ali bin Abi Thalib, YLP kemudian meminta polisi memastikan pelaku usaha yang mengajukan diri menjadi anggota YLP mendapatkan surat pernyataan bebas ideologi teroris dan dinyatakan berkelakuan baik.

Implikasi Strategi Deradikalasasi dan Penanggulangan Teroris di YLP

Tugas YLP berhasil menjadikan manusia seutuhnya melalui program-program yang terbilang cukup berat di tengah ancaman dari kelompok simpatisan ISIS. Keberhasilan tersebut berimplikasi pada dua hal; kembali pada NKRI dan sikap toleransi beragama.

1. Kembali Pada NKRI

YLP berhasil melakukan program deradikalasasi dan penanggulangan teroris yang memunculkan harapan baru berupa kesadaran untuk mengakui negara kesatuan Republik Indonesia di tanah airnya. Kembalinya mereka ke NKRI membutuhkan proses dan dialektika yang sangat panjang. Bahkan perjalanannya penuh dengan ancaman dari kelompok ISIS. Keberhasilan YLP dalam merekrut anggota eksternal tidak hanya terjadi di Lamongan, tetapi juga di beberapa tempat di Indonesia. (Wawancara Ali Fauzi, t.t.).

Ada beberapa kegiatan yang menunjukkan kembalinya YLP pada NKRI, seperti ikut serta dalam proses upacara bendera, perayaan 17 Agustus hingga kegiatan refleksi hari-hari bersejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada sedikitpun paksaan, dan menjadi pembuktian para napiter tetap memperjuangkan NKRI. Sikap nasionalisme dalam kegiatan ini sengaja dilakukan semata-mata bentuk ketundukan dan kecintaan terhadap negara (Wawancara Ali Fauzi, t.t.).

2. Sikap Toleransi Beragama

YLP terus berusaha memberikan pemahaman toleransi kepada para napiter. Hal ini dilakukan agar mereka tidak kembali bersikap radikal atau sikap fanatismenya buta. Jika fanatismenya agama dibiarkan berlarut-larut, maka perpecahan antar anak bangsa akan terjadi dengan sangat terburuk.

Agama sudah seharusnya diletakkan sebagai ajaran damai bukan ideologi kekerasan apalagi menjadi pemicu kebencian kepada orang lain. Agama yang disandarkan pada sikap fanatismenya akan dimanfaatkan untuk



menyudutkan kelompok lain, membangun propaganda dan mengangkat seolah dirinya yang paling benar.

Setelah menjalankan program deradikalasi di YLP, banyak perubahan yang terjadi di setiap individu mantan teroris. Perubahan itu tentu didasari karena banyak faktor, mulai dari benturan ideologi, ekonomi hingga diskriminasi anak dan keluarga. Untuk itulah strategi YLP mengambil peran tersebut dirasa tepat karena persoalan di atas menunjukan bahwa mereka akan hidup nyaman tanpa tekanan jika faktor-faktor tersebut tidak dirasakannya lagi. Tetapi meskipun YLP dan anggotanya telah berikrar dan berjanji tidak akan mengkhianati negara dan menyalahgunakan agama kepercayaan publik terhadap lembaga ini masih sangat minim.

Terlihat jelas bagaimana aktivis YLP yang dipelopori Ali Fauzi telah kembali memahami agama dengan sangat terbuka dan menerima segala bentuk perbedaan. Hal ini terjadi di beberapa anggota lainnya bahwa ajaran yang selama ini diyakininya (saat menjadi teroris) merupakan pemahaman agama yang salah dan jauh dari nilai-nilai agama. Agama justru memegang prinsip toleransi sejak lama, dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan kejahatan. Jika kejahatan tersebut ditemukan dalam agama sudah dipastikan ada yang salah dengan ajaran yang dipahaminya.

Hingga saat ini YLP masih terus berkomitmen dengan prinsip toleransi beragama, sesuai dengan namanya, YLP memiliki cita-cita yang luhur membangun perdamaian dalam setiap perbedaan dan menghindari perpecahan. YLP tidak lain adalah komunitas yang ingin merangkul mantan teroris menjadi manusia yang beradab dan mencetak manusia yang sesungguhnya.

SIMPULAN

Upaya deradikalasi dan penanggulangan teroris pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme adalah dengan menggandeng lembaga-lembaga yang bisa secara langsung mendekat kepada para mantan terorisme. Yayasan Lingkar Perdamaian merupakan yayasan yang didirikan oleh mantan teroris yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah untuk melakukan upaya penyadaran bagi para napiter. Strategi perubahan YLP memang berbeda dengan

lembaga rehabilitasi lainnya dalam menyelenggarakan deradikalisasi dan penanggulangan teroris. YLP menjadi poros perubahan paling ideal melakukan perubahan sikap mantan teroris.

Strategi YLP bukan hanya *recovery* ideologi, tetapi juga menerapkan langkah-langkah preventif lain, seperti pendampingan keluarga napiter dan pemulihan ekonomi. Aspek ini jarang sekali disentuh oleh pemerintah, padahal hal ini penting untuk diperhatikan, melihat dampak di masa yang akan datang kemungkinan menjadi besar. Pendampingan dan pemulihan ini dilakukan agar anak dan keluarga napiter tidak lagi tergabung dalam jaringan teroris atau menjadi bibit baru akibat perlakuan penegak hukum yang keras dalam tindakan teroris. Langkah ini berimplikasi pada beberapa aspek strategis; kembalinya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan perubahan sikap toleransi beragama.

REFERENSI

- Altier, M. B., Leonard Boyle, E., & Horgan, J. G. (2021). Returning to the fight: An empirical analysis of terrorist reengagement and recidivism. *Terrorism and Political Violence*, 33(4), 836–860.
- Arikunto, S. (2006). *Produser Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakashmar, M. (2005). Extremist deradicalisation programmes: A comparative perspective. *Order*. 13: 9–24.
- Codingest. (2022). (t.t.). Diambil 21 Oktober 2022, dari <https://www.bnpt.go.id/>.
- Dhumad, S., Candilis, P. J., Cleary, S. D., Dyer, A. R., & Khalifa, N. (2020). Risk factors for terrorism: A comparison of family, childhood, and personality risk factors among Iraqi terrorists, murderers, and controls. *Behavioral sciences of terrorism and political aggression*, 12(1), 72–88.
- Djelantik, S. (2010). *Terorisme: Tinjauan psiko-politis, peran media, kemiskinan, dan keamanan nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dokumen Profil Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP), n.d. (t.t.).
- Evans, O., & Kelikume, I. (2019). The impact of poverty, unemployment, inequality, corruption and poor governance on Niger Delta militancy, Boko Haram terrorism and Fulani herdsmen attacks in Nigeria. *International Journal of Management, Economics and Social Sciences (IJMESS)*, 8(2): 58–80.



- Fauziyah, N., & Hidayati, F. (2022). Building Religious Moderation Through a Behavior Approach to Tolerance and Anti-Radicalism in Adolescents. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 16(2): 301–320.
- Firdaus, I. (2017). Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum*.
- Firmansyah, R. (2019). Rehabilitasi dan deradikalasi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme. *Thesis*. Universitas Airlangga. Tidak dipublikasikan.
- Hanani, S., & Nelmaya, N. (2020). Penguatan Moderasi Beragama untuk Mengatasi Intoleransi di Kalangan Intelektual Kampus. *Kontekstualita*, 35(02): 91–102.
- Hidayat, M., & Husna, S. (t.t.). Resiliensi Keluarga Teroris A: Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress Sebagai Keluarga Teroris. *SOSIO KONSEPSIA*, 158.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2): 1–20.
- Jundulloh, A., & Arifin, A. A. (2021). Implementasi Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Studi Kasus Deradikalasi terhadap Mantan Napi Terorisme di Yayasan Lingkar Perdamaian Kabupaten Lamongan. *Journal of Islamic Management*, 1(1): 55–60.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.
- Nawawi, Ismail, 2009. *Public Policy*. Surabaya: PNM.
- Mubarak, S., Badrian, B., & Mubarak, F. (2020). Peran Kearifan Lokal dalam Upaya Deradikalasi Paham Radikal di Kalimantan Selatan. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18(2): 155–172.
- Nainggolan, P. P. (2018). Mengapa Indonesia Sangat Rawan Dari ISIS/IS? *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 7(2).
- Noor, A. M. (t.t.). Pendidikan Islam Rahmat Li Al-'Alamin dan Implikasinya Terhadap Karakter (Studi Pesantren Metal Mulim Al-Hidayah Pasuruan). *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9, 19–32.
- Rahman, K., & Noor, A. M. (2020). *Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme*. Universitas Brawijaya Press.
- Ramli, R. (2018). The Eradication of Terrorism Acts: Effectiveness and Human Rights Violation. *International Journal of Global Community*, 1(1), 39–55.
- Salihu, H. (2018). Is Boko Haram a “child” of economic circumstances? *International Journal of Social Economics*, 45(8).
- Schwing, R. (2002). A mental model proposed to address sustainability and terrorism issues. *Risk analysis*, 22(3): 415–420.

- Sugiarto, S. (2020). Communication Strategy of the National Counter Terrorism Agency in the Deradicalization Program in Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(2): 195–214.
- Sukabdi, Z. A. (2017). Psychological rehabilitation for ideology-based terrorism offenders. *International Journal of Neurorehabilitation*, 4(01): 2376–0281.
- Yuryevich Zelenkov, M., Leonidovna Kruglova, E., Nikolaevna Ryabchikova, L., Viktorovich Kibakin, M., & Remarchuk, V. N. (2021). How to lower the possibility of terrorism development in democratic society? *Justicia*, 26(39): 57–78.
- Zainuddin, M. (2019). *Merawat keberagamaan dalam keragaman*. (A. Ghozi, Ed.). Magnum Pustaka Utama. <http://repository.uin-malang.ac.id/4509/>

